RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN 2020

Nomor : RIS-1/D2.MBU/01/2020
Tanggal: 23 Januari 2020

A. PENDAHULUAN

I. Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS:

Sesuai dengan undangan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: AP.I.520/KU.01.03/2020/DU-B tanggal 22 Januari 2020. Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Angkasa Pura I (Persero) pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 23 Januari 2020
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lt.9 - Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110
Acara	:	1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020. 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2020. 3. Persetujuan dan pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. 4. Persetujuan dan pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. 5. Persetujuan Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan. 6. Penerbitan Obligasi/Sukuk dan atau Pinjaman Bank/Non Bank sebesar Rp10 Triliun. 7. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan perubahan dan relokasi anggaran program/kegiatan dalam satu kelompok investasi dengan nilai maksimum 10% dari total nilai investasi tahun 2020 pada kelompok investasi tersebut dan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan perubahan penambahan/penghapusan antar kelompok investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2020 tanpa merubah nilai total investasi dan ketentuan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan keputusan.

II. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat :

a. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

b. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

c. Peraturan.../2

c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara No. 4556);
e. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
f. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2024;
g. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN;
h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 juncto PER-03/MBU/12/2016 jo PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
i. Anggaran Dasar PT Angkasa Pura I (Persero) yang terakhir diubah dengan akte Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN. Nomor 55 tanggal 27 Maret 2019;
j. Surat Kuasa Menteri BUMN dengan hak subtitusi kepada Wakil Menteri BUMN II Nomor: SKU-6/MBU/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Surat Kuasa Wakil Menteri BUMN II dengan hak subtitusi kepada Plt. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Nomor: SKU-4/WK2.MBU/01/2020 tanggal 20 Januari 2020.

III. Peserta RUPS

1. Pemegang Saham

Plt. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata	:	Hendrika Nora Osloi Sinaga

2. Dewan Komisaris

▪ Komisaris Utama	:	Djoko Sasono
▪ Komisaris	:	Tri Budi Satriyo
▪ Komisaris	:	Suprasetyo
▪ Komisaris	:	Harry Z. Soeratin
▪ Komisaris	:	Ali Mochtar Ngabalin

3. Direksi

▪ Direktur Utama	:	Faik Fahmi
▪ Direktur Teknik	:	Lukman F. Laisa
▪ Direktur SDM dan Umum	:	Adi Nugroho
▪ Direktur Operasional	:	Wendo Asrul Rose
▪ Direktur Pemasaran dan Pelayanan	:	Devy Suradji
▪ Direktur Keuangan	:	Novrihandri
▪ Direktur Pengembangan Usaha	:	Sardjono Jhony Tjitrokusumo

B. Jalannya.../3

IV. Jalannya RUPS

1. Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) membuka rapat dan menyerahkan pimpinan rapat kepada Kuasa Pemegang Saham Perusahaan;
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perseroan, maka RUPS sah dan berhak mengambil keputusan mengikat;
3. Pemaparan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai RKAP Tahun 2020 dan RKA PKBL Tahun 2020;
4. Tanggapan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) mengenai RKAP Tahun 2020 dan RKA PKBL Tahun 2020;
5. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai RKAP Tahun 2020 dan RKA PKBL Tahun 2020;
6. Pembacaan Keputusan RUPS RKAP Tahun 2020 dan RKA PKBL Tahun 2020;
7. Penandatanganan Risalah RUPS, Kontrak Manajemen Perusahaan dan Kontrak Manajemen Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero);
8. Pimpinan Rapat menyerahkan kembali kepada Komisaris Utama;
9. Komisaris Utama menutup RUPS.

V. Keputusan RUPS

Setelah dilakukan pembahasan terhadap RKAP Tahun 2020 dan RKA-PKBL Tahun 2020 serta memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS memutuskan berdasarkan agenda diatas sebagai berikut:

1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

   a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

   Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2020 ditargetkan Total Aset sebesar Rp46.456.792 juta atau meningkat 15% dari prognosa tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Aset			
Aset Lancar	Rp	5.404.723	juta
Aset Tidak Lancar	Rp	41.052.070	juta
Jumlah Aset	**Rp**	**46.456.792**	**juta**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Jangka Pendek	Rp	5.196.201	juta
Liabilitas Jangka Panjang	Rp	25.422.558	juta
Ekuitas	Rp	15.838.033	juta
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**Rp**	**46.456.792**	**juta**

   b. Laporan Laba Rugi Konsolidasian

   Laba Rugi Konsolidasian PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2020 ditargetkan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp1.401.648 juta atau meningkat 7% dari prognosa tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Operasi	Rp	11.329.355	juta
Beban Operasi	Rp	7.886.968	juta
Laba (Rugi) Usaha	Rp	3.442.387	juta
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp	(1.453.324)	juta
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp	1.989.063	juta
Pajak Penghasilan	Rp	587.415	juta
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	**Rp**	**1.401.648**	**juta**

c. Investasi.../4

c. Investasi

1.	Operasional	Rp	3.677.308 juta
2.	Pengembangan	Rp	6.510.173 juta
	Total	**Rp**	**10.187.481 juta**

d. Sumber Daya Manusia

• Pegawai Organik	:	3.847 Orang
• Pegawai Outsourcing	:	5.619 Orang
Jumlah	**:**	**9.466 Orang**

e. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Target tingkat kesehatan RKAP tahun 2020 sesuai perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 adalah

No.	Indikator	Bobot	RKAP 2020
1	Aspek Keuangan	50	41
2	Aspek Operasional	35	35
3	Aspek Administrasi	15	15
Total		**100**	**91**
Kategori Tingkat Kesehatan			**Sehat AA**

f. RKA Dewan Komisaris

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris sebagaimana yang tertera di dalam Buku RKAP Tahun 2020 PT Angkasa Pura I (Persero).

2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2020, sebagai berikut:

a. Program Kemitraan

Dana Tersedia

Saldo Awal	Rp	0	juta
Alokasi penyisihan laba yang diterima	Rp	0	juta
Pengembalian Pokok Pinjaman	Rp	25.176	juta
Penerimaan Lainnya	Rp	2.441	juta
Jumlah Dana Tersedia	**Rp**	**27.617**	**juta**

Penggunaan Dana

Pinjaman	Rp	23.542	juta
Hibah BUMN Khusus	Rp	2.000	juta
Hibah Pembinaan	Rp	2.075	juta
Jumlah Penyaluran Dana	**Rp**	**27.617**	**juta**
Saldo Dana per 31 Desember 2020	**Rp**	**0**	**juta**

b. Program Bina Lingkungan

Dana Tersedia

Saldo Awal	Rp	0	juta
Alokasi Beban Perusahaan	Rp	36.660	juta
Jasa Giro & Bunga Deposito	Rp	0	juta
Jumlah Dana Tersedia	**Rp**	**36.660**	**juta**

Penyaluran Dana

Bantuan korban bencana alam	Rp	1.220	juta
Bantuan Pendidikan dan/atau pelatihan	Rp	10.654	juta
Bantuan peningkatan kesehatan	Rp	5.406	juta
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	Rp	6.450	juta
Bantuan sarana ibadah	Rp	4.216	juta
Bantuan pelestarian alam	Rp	1.290	juta
Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan	Rp	7.423	juta
Jumlah Penyaluran Dana	**Rp**	**36.660**	**juta**
Saldo Dana per 31 Desember 2020	**Rp**	**-**	**juta**

3. Menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero), yang telah mengacu pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan surat Menteri BUMN Nomor: S-574/MBU/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 perihal Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020.

4. Menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) Tahun 2020 antara Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) yang telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN.

5. Menyetujui dan mengesahkan Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2020 PT Angkasa Pura I (Persero) sebagaimana usulan dari Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) dalam surat Nomor: 82.DK.AP.I/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2020.

6. Menyetujui Penerbitan Obligasi/Sukuk dan atau Pinjaman Bank/Non Bank sebesar Rp10 triliun, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Mentaati seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan penerbitan Obligasi/Sukuk dan atau pinjaman Bank/Non Bank serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)*;
   b. Pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati (*prudent)* dan melakukan mitigasi resiko terhadap semua resiko yang berpotensi muncul mulai dari aspek legal, aspek operasional dan aspek keuangan perusahaan;
   c. Direksi agar memperhatikan surat Dewan Komisaris Nomor: 83/DK.AP.I/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Rencana Pendanaan Eksternal Tahun 2020.
   d. Penerbitan Obligasi/Sukuk dan atau pinjaman Bank/Non Bank agar dilakukan dengan memperhatikan pemilihan *timing* dan tenor yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan perusahaan;

e. Dewan..../6

e. Dewan Komisaris agar melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring secara berkala atas pelaksanaan Penerbitan Obligasi/Sukuk dan atau pinjaman Bank/Non Bank tersebut memperhatikan nilainya sangat material bagi perusahaan;
f. Persetujuan Penerbitan Obligasi/Sukuk dan atau Pinjaman Bank/Non Bank tersebut diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan RUPS ini.

7. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada :
   a. Direksi untuk melakukan perubahan dan relokasi anggaran program/kegiatan dalam satu kelompok investasi dengan nilai maksimum 10% dari total nilai investasi tahun 2020 pada kelompok investasi tersebut, dan
   b. Dewan Komisaris untuk melakukan persetujuan perubahan penambahan/ penghapusan antar kelompok investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2020 tanpa merubah nilai total investasi dan ketentuan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan keputusan.

B. ARAHAN RUPS

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 serta RKA-PKBL Tahun 2020, Direksi dan Dewan Komisaris diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buku RKAP, RKA-PKBL, Kontrak Manajemen *(Key Performance Indicators)* antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, dan Kontrak Manejemen *(Key Performance Indicators)* antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta saran rekomendasi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2020 sebagaimana disampaikan dalam surat tanggapan Dewan Komisaris Nomor: 82.DK.AP.I/2019 tanggal 27 November 2019, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2020 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.

2. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk:
   a. Memastikan bahwa target pendapatan pada RKAP Tahun 2020 merupakan batas minimal yang harus diupayakan pencapaiannya melalui program *revenue enhancement* sedangkan anggaran biaya merupakan target maksimal yang harus diupayakan melalui program *cost leadership* dan strategi keuangan yang *sustainable.*
   b. Mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional melalui Program 5 Bali Baru, khususnya untuk Destinasi Borobudur Yogyakarta, Likupang Manado, dan Mandalika Lombok.
   c. Memastikan perusahaan agar lebih optimal, inovatif, dan agresif dalam pengembangan bisnis khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan non-aero, terutama pada segmen-segmen usaha melalui intensifikasi dan diversifikasi usaha maupun *pricing*, melakukan *digital monetizing,* optimalisasi sumber daya perusahaan termasuk anak perusahaan, menciptakan segmen usaha baru secara anorganik dan memperluas sinergi antar BUMN.

d. Memperhatikan…./7

d. Memperhatikan kinerja beberapa bandara yang masih merugi, perusahaan agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh baik operasional maupun finansial agar tidak menjadi beban induk perusahaan. Untuk penugasan bandara baru, agar dibuatkan perencanaan yang lebih konkret dengan melibatkan pemangku kepentingan sehingga kapasitas bandara lebih optimal, memberikan kontribusi bagi perusahaan dan mampu meningkatkan perekonomian daerah.

e. Melakukan evaluasi terhadap kompetensi manajemen maupun bisnis model anak perusahaan dalam rangka penyehatan anak perusahaan melalui peningkatan pendapatan serta utilisasi sumber daya dengan optimal dan *cost efficiency*. Anak perusahaan diharapkan dapat meningkatkan *value* dan berkontribusi pada grup perusahaan sesuai *Shareholder Aspirations,* yaitu anak perusahaan BUMN harus mampu meningkatkan nilai BUMN dan atau kegiatan bisnisnya untuk menunjang kinerja induk sehingga tidak menjadi beban induk perusahaan.

f. Meningkatkan optimalisasi khususnya pada 3 (tiga) bandara yang menjadi Program Strategis Nasional diantaranya: Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, melalui pengoperasian yang andal sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada perusahaan.

g. Meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas SDM perusahaan maupun anak perusahaan sehingga mampu mendukung peningkatan kapasitas perusahaan dan dalam mendukung implementasi Program Holding Aviasi dan atau *Indonesia Tourism Ecosystem* (ITE) serta mampu mewujudkan kearifan lokal dan identitas setiap bandara, termasuk meningkatkan *customer experience* antara lain berupa tingkat keamanan, pelayanan, dan kenyamanan bandara.

3. Direksi dan Dewan Komisaris agar segera melakukan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan Program Pengembangan Anak Perusahaan khususnya yang akan memperoleh tambahan setoran modal dari perusahaan sebagaimana program investasi tahun 2020 termasuk mempersiapkan:
   a. Kajian Kelayakan Tambahan Modal pada Anak Perusahaan;
   b. Pakta Integritas Direksi;
   c. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris.

4. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko investasi dan menjaga ketepatan waktu penyelesaian seluruh program investasi tahun 2020, khusus untuk investasi program pengembangan terlebih dahulu agar dilengkapi dengan kajian kelayakan yang memadai, pakta integritas serta mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris.

5. Dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang PKBL.
   b. Memperhatikan seluruh arahan sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan RKA-PKBL Tahun 2020 Nomor: RIS-17/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 13 November 2019.

C. PENUTUP.../8

C. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat, maka Komisaris Utama menutup RUPS PT Angkasa Pura I (Persero).

Jakarta, 23 Januari 2020

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

METERAI TEMPEL
TGL 20
00B27AHF161558507
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hendrika Nora Osloi Sinaga
Plt. Deputi Bidang Usaha Energi,
Logistik, Kawasan, dan Pariwisata

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS	**DIREKSI**
Djoko Sasono	**Faik Fahmi**
Komisaris Utama	Direktur Utama

C. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat, maka Komisaris Utama menutup RUPS PT Angkasa Pura I (Persero).

Jakarta, 23 Januari 2020

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Hendrika Nora Osloi Sinaga
Plt. Deputi Bidang Usaha Energi,
Logistik, Kawasan, dan Pariwisata

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
METERAI TEMPEL 48E04AHF161558512 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Djoko Sasono	**Faik Fahmi**
Komisaris Utama	Direktur Utama

C. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalam rapat, maka Komisaris Utama menutup RUPS PT Angkasa Pura I (Persero).

Jakarta, 23 Januari 2020

KUASA PEMEGANG SAHAM
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

Hendrika Nora Osloi Sinaga
Plt. Deputi Bidang Usaha Energi,
Logistik, Kawasan, dan Pariwisata

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
Djoko Sasono	**Faik Fahmi**
Komisaris Utama	Direktur Utama